

LAW ENFORCEMENT IN THE USE OF CHEMICAL WEAPONS IN ARMED CONFLICT

Lorie Tegar Prakoso

Universitas Airlangga

lorietegar@gmail.com

Abstract

Despite the declaration of St. Petersburg in 1868, Brussels Declaration of 1874, Hague Convention of 1899. Chemical weapons were used even in warfare which resulted in the deaths of more than one hundred thousand people and around one million people injured. The 1925 Geneva Protocol prohibits the use of biological weapons and chemical weapons, but does not prohibit the development, production, stockpiling or distribution, and does not regulate the handling mechanisms and procedures in the event of a violation. Then the Chemical Weapon Convention (CWC) was formed which regulates the use of chemical weapons in general, which means during times of peace or armed conflict. There are several forms of sanctions that can be imposed on parties to disputes in the internal Syrian conflict, namely non-military sanctions and military sanctions. In the context of international law, non-military sanctions are regulated in Article 41 of the UN Charter while military sanctions are regulated in Article 42 of the UN Charter which determines the authority of the UN Security Council to impose sanctions. The involvement of OPCW as an international organization in disarming chemical weapons by terrorist IS and opposition groups that are not recognized by the Syrian government has limited operations. Therefore, OPCW as an international organization based on CWC in world chemical disarmament requires greater authority and fluency in upholding its rules. According to article 13 letter b of the Rome Statute it has been stipulated that the UN Security Council based on its authority under Chapter VII of the United Nations Charter has the right to submit to the Court through the Prosecutor for crimes that have not or have not ratified the Statute. Article 13 letter b of the ICC is a strong and legal juridical basis to legitimize the UN Security Council in making policies to hand over cases of gross human rights violations in the Syrian conflict to the ICC.

Keywords: Law Enforcement, Chemical Weapons, Armed Conflict

Pendahuluan

Perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia, dimana dahulu, perang merupakan pembunuhan besar-besaran diantara para pihak yang berperang. Perang juga merupakan salah satu bentuk dari naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan diantara sesama manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa cara perang yang tidak mengenal batas akan merugikan manusia itu sendiri, sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan dan pengaturan tentang perang. Tulisan dan pemikiran tentang hukum perang merupakan awal dari perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri.¹

Dalam bukunya, Henry Dunant yang berjudul *Un Souvenir de Solferino* yang isinya menceritakan tentang pertempuran antara tentara Austria dengan tentara gabungan Perancis Sardinia. Ia juga menggambarkan bahwa tentara yang luka dan sakit di medan perang ternyata sangat menderita disebabkan mereka tidak mendapat pertolongan pada waktu yang tepat serta tidak mendapatkan perawatan yang semestinya. Dalam buku *Un Souvenir de Solferino* ini berisi dua gagasan utama, yaitu:

1. Perlunya dibentuk komite-komite pertolongan di masa damai untuk melatih relawan yang akan merawat korban luka di masa perang, yang dari gagasan ini nantinya menjadi cikal bakal perhimpunan-perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, dan
2. Perlunya perjanjian internasional untuk mengakui dan melindungi komite-komite tersebut, dimana gagasan kedua ini merupakan landasan hukum humaniter internasional.

Kemudian dibentuklah Komite Internasional Palang Merah (*The International Committee of the Red Cross/ICRC*) pada tahun 1863 yang membahas kekurangan perawatan kesehatan pada tentara yang sedang bertempur di darat sebagai perwujudan gagasan Henry Dunant dalam bukunya tersebut. Pada tahun berikutnya diadopsi Konvensi Jenewa 1864 yaitu Konvensi untuk Perbaikan Keadaan Korban Luka dalam Angkatan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Djenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Binatjipta, Bandung, 1968, h.7.

Bersenjata di Medan Pertempuran Darat. Konvensi Jenewa 1864 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1906 dan tahun 1929. Perubahan ini didasarkan oleh pengalaman-pengalaman dalam Perang Dunia I dan perkembangan teknologi dengan digunakannya pesawat terbang sebagai sarana transportasi dan salah satu sarana dalam pertempuran.

Pada tahun 1907, lahir Konvensi Den Haag 1907 yang terdiri dari:

1. Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai (Konvensi I);
2. Konvensi mengenai Cara Mengawali Permusuhan (Konvensi III);
3. Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Peperangan di Darat (konvensi IV) dan annex (Hague Regulations);
4. Konvensi mengenai Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral dalam Perang di Darat (Konvensi V).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, ditandai dengan dibentuknya Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) yang terdiri dari 4 Konvensi, yaitu:

1. Konvensi Jenewa 1949 untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*);
2. Konvensi Jenewa 1949 untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members or Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*);
3. Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*);
4. Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War, of August 12, 1949*).

Hukum Humaniter Internasional atau dikenal juga dengan *Internasional Humanitarian Law applicable in armed conflict* biasa disebut dengan hukum humaniter merupakan nama baru bagi laws of war atau hukum perang, yang meliputi ketentuan-ketentuan dalam Hukum Den Haag (Konvensi Den Haag 1907) dan Hukum Jenewa (Konvensi Jenewa 1949) beserta dua Protokol Tambahannya, yaitu Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II.²

Hukum Humaniter Internasional sendiri memiliki tujuan, antara lain:³

1. memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu
2. menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh, dimana kombatan yang jatuh ketangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang
3. mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter tidak hanya mengikat negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan dalam perjanjian atau kebiasaan humaniter internasional, tetapi juga terhadap individu-individu termasuk anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Disamping itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional mengikat pasukan-pasukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terlibat dalam suatu konflik militer, tetapi bisa ada pertimbangan pasukan PBB tidak terikat dengan ketentuan tersebut jika terlibat dalam operasi dalam suatu negara, sedangkan pasukan atau angkatan perang yang berasal dari negara tersebut tetap harus tunduk pada pengaturan dalam hukum humaniter.⁴

Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun perjanjian-perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak diterapkan dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Penegakan hukumnya pun terhadap para pihak yang terlibat

² Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,, h. 26

³ Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 362.

⁴ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 729.

pelanggaran tidak dijatuhi sanksi yang efektif, sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter masih belum efektif dalam pelaksanaannya.

Negara yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tersebut mempunyai kewajiban membuat mekanisme nasional dengan membentuk suatu undang-undang nasional yang akan memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat atas ketentuan-ketentuan diatas.

Negara pihak pada perjanjian-perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya berkewajiban pula untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat yang merupakan kejahatan perang dan negara tersebut harus mengadili orang-orang tersebut tanpa memandang kebangsaannya, atau menyerahkannya kepada negara pihak lainnya untuk dapat diadili.

Sistem diatas didasari pada tiga kewajiban yang mendasar, yakni:⁵

1. Kewajiban untuk menerbitkan peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum humaniter.
2. Kewajiban untuk mencari orang yang dituduh melakukan pelanggaran.
3. Kewajiban untuk mengadili pelaku pelanggaran.

Hukum nasional sebuah negara memegang peran yang sangat penting dan utama dalam penegakan terhadap kejahatan perang atau pelanggaran hukum humaniter yang terjadi. Mekanisme yang ditempuh adalah dengan menerbitkan suatu hukum nasional yang mengatur tentang pelanggaran hukum humaniter dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, kemudian menggunakan hukum nasional dan pengadilan nasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan perang atau pelanggar hukum humaniter.

Jika negara pihak tidak melakukan tindakan nyata berkaitan dengan pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh warga negaranya atau yang terjadi di wilayah negaranya, maka mekanisme penegakan hukum yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan individu yang memerintahkan atau melakukan pelanggaran hukum humaniter atau kejahatan perang ke pengadilan internasional. Pengadilan

⁵ ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda, ICRC, Jakarta, 2002, h. 108.

internasional yang apabila harus diadakan, hanyalah merupakan pelengkap atau komplementer saja sifatnya.

Dalam hal sebuah negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan perang, atau pengadilan nasional yang telah dilakukan ternyata berjalan secara tidak adil, maka pengadilan internasional yang memungkinkan untuk mengadili pelaku adalah:

1. Mahkamah Pidana Internasional ad-hoc.
2. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*).

Penegakan Hukum dalam Penggunaan Senjata Kimia

Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya.

Meskipun telah ada deklarasi St. Petersburg Tahun 1868, Deklarasi Brussel (*Brussels Declaration*) Tahun 1874, Konvensi Den Haag 1899. Senjata kimia tetap dipakai bahkan dalam peperangan telah mengakibatkan korban lebih dari seratus ribu orang meninggal dan sekitar satu juta orang cidera. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, sehingga kemudian tercapai *protocol for the the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, poisonous or other Gases, and of Bacteriologiccal Methods of Warfare* (Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun atau Gas lainnya, dan tentang metode peperangan dengan menggunakan bakteri), yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925, selanjutnya disebut protokol Jenewa pada tahun 1925.⁶

Protokol Jenewa 1925 telah melarang penggunaan senjata biologi dan senjata kimia, namun tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya, serta tidak mengatur terkait mekanisme dan prosedur penanganan dalam hal terjadi pelanggaran. Karena kelemahan-kelemahan protokol Jenewa 1925 yang telah disebutkan diatas, dan juga dengan mulai meningkatnya kesadaran terhadap bahaya dari senjata pemusnah massal,

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya.

maka dari itu masyarakat internasional terus mengupayakan tercapainya pelarangan total senjata kimia tersebut.⁷

Setelah dibentuknya Protokol Jenewa 1925 dan Protokol Tambahan I 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949 untuk menjawab permasalahan paling tidak meminimalisir penggunaan senjata kimia akan tetapi masih saja penggunaan senjata kimia dalam peperangan ditemukan seperti pada perang Suriah akhir-akhir ini.

Kemudian dibentuklah *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction* disahkan, yang selanjutnya disebut *Chemical Weapon Convention* (CWC) pada tahun 1992 yang mengatur terkait penggunaan senjata kimia pada umumnya, yang berarti pada masa damai ataupun konflik bersenjata. Untuk menjalankan aturan-aturan yang terdapat pada CWC itu sendiri kemudian dibentuklah OPCW (*Organization For The Prohibition Of Chemical Weapons*) yang merupakan organisasi independen dan terlepas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Apabila terdapat kasus penggunaan senjata kimia yang melibatkan negara bukan anggota CWC, termasuk pada teritorial diluar penguasaan oleh negara anggota CWC maka OPCW diharuskan bekerjasama dengan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi yang diberikan oleh OPCW bekerjasama dengan PBB agar timbulnya efek jera adalah dengan melakukan penghancuran senjata kimia di seluruh dunia yang kini telah mencapai 96,5%. Amerika Serikat adalah satu-satunya possesor state yang belum menghancurkan senjata kimia (kategori 1). Sementara itu, untuk prekursor senjata kimia dan limbah berbahaya (kategori 2) dan amunisi kosong (kategori 3) pemusnahannya telah mencapai 100%.

Kronologis Terjadinya Konflik di Suriah

Suriah sebagai salah satu negara Timur Tengah ikut terkena imbas fenomena *Arab Spring*. Gerakan politik damai yang dimulai dari protes jalanan massa sebagai imbas krisis politik kawasan Arab (Tunisia) dengan cepat menyebar ke hampir seluruh wilayah negara-negara Arab seperti Mesir, Libya, Yaman termasuk Suriah yang hingga kini masih bergejolak. Khusus terhadap Suriah fenomena politik *Arab Spring* tersebut berubah

⁷ Ibid, h. 2.

menjadi konflik bersenjata sekatrian yang akhirnya ikut menyeret terlibatnya sejumlah negara kawasan dan sekutu kawasan khususnya negara Timur Tengah. Konflik bersenjata di Suriah merupakan revolusi rakyat adalah lanjutan dari revolusi Arab Spring merupakan sebuah fenomena merebaknya revolusi demokrasi di dunia Arab.⁸

Konflik yang bermula pada awal musim semi 2011 dalam konteks Arab Spring, melalui aksi protes massal nasional menentang Presiden Bashar al-Assad, serta tindakan balasan pemerintah Bashar dengan cara kekerasan, benar-benar telah merubah negara damai ini menjadi medan perang yang memunculkan prahara kemanusiaan. Situasi menjadi semakin runyam ketika dunia internasional menyorotinya. Tim pemantau PBB yang dipimpin Kofi Anan pun tidak mampu bekerja maksimal untuk menghentikan berperang tersebut.⁹

Komplesitas konflik tersebut seakan semakin tidak berujung ketika ketika mayoritas anggota dewan keamanan PBB seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat menghendaki resolusi yang berfokus pada pemberian sanksi ke Suriah, namun Rusia dan China berkali-kali menggunakan hak vetonya, bahkan ketika yang dikehendaki bukan campur tangan militer sekalipun. Intinya Rusia menegaskan menolak adanya campur tangan negara lain dalam bentuk apa pun. Situasi ini dalam perkembangannya menyebabkan Suriah terjurumus dalam perang saudara.¹⁰

Dalam perkembangannya, perang sipil Suriah tersebut berubah dan terpecah menjadi berbagai faksi militer yang berperang satu sama lainnya. Masing-masing faksi yang terlibat dalam konflik tersebut mendapat dukungan dari sejumlah negara kawasan maupun luar kawasan Timur Tengah. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam perang sipil Suriah bisa dibagi ke dalam 4 (empat) kubu utama, yaitu kubu pro pemerintahan Basha Al-Assad, kubu anti pemerintahan Bashar Al-Assad, kubu non-Arab dengan haluan politik

⁸Perang Suriah, <http://www.antaranews.com/berita/396402/bashar-suriah-bukan-perang-saudara-tetapi-diserang-al-qaida>, Diakses pada 5 Juni 2019.

⁹Konflik Suriah, <http://politik.kompasiana.com/2012/07/23/serba-salah-tentang-suriah-480011.html>, Diakses pada 5 Juni 2019.

¹⁰Pemberontak Suriah, <http://www.dw.de/as-berikan-bantuan-militer-kepada-pemberontak-suriah/a-16880305>, Diakses pada 5 Mei 2019.

yang bervariasi, kubu kekhalifahan yang ingin mendirikan negara Islam di Suriah dan sekitarnya.¹¹

Perkembangan dari konflik tersebut menimbulkan kompleksitas konflik bersenjata internal Suriah dan secara tidak langsung juga berimplikasi pada perubahan tatanan definitif tentang konflik bersenjata menurut pandangan hukum humaniter internasional. Perubahan pandangan secara hukum humaniter tersebut karena munculnya pihak-pihak lain dalam konflik internal Suriah hingga merubah sudut pandang akademis apakah konflik bersenjata Suriah tersebut masih termasuk dalam kualifikasi jenis konflik bersenjata internal (*non internasional armed conflict*).

Konflik bersenjata (*armed conflict*) di dalam hukum humaniter dapat digolongkan menjadi:

1. Konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*);
2. Konflik bersenjata internal (*non international armed conflict / armed conflict not of an international character*); dan
3. Internasionalisasi konflik.

Perbedaan pokok antara *international armed conflict*, *non international armed conflict*, dan internasionalisasi konflik itu sendiri dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam *international armed conflict*, ke dua belah pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara. Sedang dalam *non international armed conflict*, status ke dua belah pihak tidak sama, pihak yang satu berstatus negara, sedang pihak lainnya adalah satuan bukan negara (*non state entity*).¹²

Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) Konvensi Jenewa 1949 di atas tidak secara eksplisit memberikan suatu terminologi dari konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*). Namun jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Paragraf 3 Protokol I 1977,¹⁷ maka jelaslah bahwa substansi materi dari Pasal 2 Ketentuan Bersamaan

¹¹ Perang Sipil Suriah, <http://republik-tawon.blogspot.com/2014/10/daftar-kelompok-bersenjata-dalam-perang.html>, Diakses pada 7 Juni 2019.

¹² Arlina Permatasari, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, cetakan pertama, International Committee Of The Red Cross, Jakarta, 1999, h. 139.

(*Common Articles*) Konvensi Jenewa 1949 ini adalah terminologi dari konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*).¹³

Protokol Tambahan I 1977 di atas mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa definisi konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) adalah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949.¹⁴ Sedangkan ketentuan tentang konflik bersenjata internal (*non international armed conflict*) dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977.

Dari penjelasan diatas terkait jenis-jenis konflik bersenjata, maka konflik yang terjadi di Suriah termasuk dalam kualifikasi konflik bersenjata yang terinternasionalisasi. Penilaian yuridis yang menjadi alasan konflik Suriah masuk dalam kualifikasi internasional, karena masuknya sejumlah negara tertentu yang ikut mendukung salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dukungan yang diberikan berupa suplai senjata, pelatihan militer serta finansial terhadap sejumlah pihak-pihak oposisi tertentu yang berperang.

Hal ini merujuk pada konflik internal Suriah yang dikaitkan dengan konflik bersenjata internal menurut Sanremo Manual yang menyatakan : Non-internal armed conflicts are armed confrontation occurring within the territory of a single state and in which the armed force of no other state are engaged against the central government. Jadi, berdasarkan Sanremo Manual tersebut konflik bersenjata non internasional adalah konfrontasi bersenjata dalam suatu wilayah negara dimana tidak ada keterlibatan dari negara lain yang berperang melawan pemerintah pusat dari negara dimana konflik bersenjata tersebut terjadi.¹⁵

Kelompok oposisi yang dimotori oleh *Free Army Syria* (FSA), sebagaimana dinyatakan oleh dan juru bicara koordinator politik Louay Muqdad, mengakui telah menerima sejumlah jenis senjata, yang akan digunakan untuk menggulingkan kekuasaan Rezim Assad. Saudi dan Qatar berada di garis terdepan dalam membela kelompok bersenjata di Suriah. Sejumlah negara Arab pesisir Teluk Persia tersebut juga telah

¹³ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997, h. 5.

¹⁴ Arlina Permanasari, *Op.cit*, h. 138.

¹⁵ Michael N. Schmitt, *The Manual on The Law of Non International Armed Conflict*, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy, 2002, h. 2.

memberikan dana sebesar 100 juta dolar bagi faksi-faksi yang berperang untuk mengulingkan pemerintahan Bashar Al Assad. Disisi lain juga Riyadh dan Doha dengan bekerjasama dengan Amerika dan sekutunya di kawasan mensuplai senjata ke Suriah, termasuk senjata berat seperti rudal anti-tank, anti pesawat udara.¹⁶

Disi lain rezim Bashar juga didukung oleh sejumlah sekutu kawasan seperti Iran, Rusia dan Hizbullah. Iran dan Hizbullah juga ditengarai bukan saja memberikan dukungan senjata dan pelatihan militer tetapi juga ikut menerjunkan para tentaranya untuk berperang besama tentara pemerintah memerangi kelompok pemberontak anti Rezim Bashar Al Assad. Munculnya sejumlah pihak yang ikut mengintervensi konflik bersenjata Suriah, serta dengan berbagai alasan politik keterlibatan pihak tersebut benar-benar telah merubah definisi dari identifikasi konflik bersenjata Suriah. dari awal hanya termasuk kualifikasi konflik bersenjata internal berubah menjadi konflik bersenjata internasional.¹⁷

Perubahan status dari konflik bersenjata internal menjadi konflik bersenjata internasional juga dijelaskan oleh Pietro Verri, bahwa::

“Suatu konflik non internasional (atau konflik internal), dapat dianggap (menjadi) konflik bersenjata yang bersifat internasional apabila telah terpenuhi syarat-syarat berikut .¹⁸

1. Jika suatu negara yang berperang melawan pasukan pemberontak di dalam wilayahnya telah mengakui pihak pemberontak tersebut sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*);
2. Jika terdapat satu atau lebih negara asing yang memberikan bantuan kepada salah satu pihak dalam konflik internal, dengan mengirimkan Angkatan Bersenjata resmi mereka dalam konflik yang bersangkutan; dan

¹⁶ Free Army Syria (FSA), http://indonesian.ws.irib.ir/international/timur-tengah/item/45250-Saudi_dan_Qatar_, Diakses pada 10 Juni 2019.

¹⁷ Sekutu rezim Bashar al Assad <http://www.dw.de/konferensi-damai-suriah-tanpa-perdamaian/a-17380238>, Diakses pada 10 Juni 2019.

¹⁸Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, ICRC, Geneva, 1992, h. 35.

3. Jika terdapat dua negara asing, dengan Angkatan Bersenjata masing-masing melakukan intervensi dalam suatu negara yang sedang terlibat konflik internal, di mana masing-masing angkatan bersenjata tersebut membantu pihak yang saling berlawanan.

Sengketa bersenjata non internasional melibatkan beberapa pihak antara lain pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara. Namun sifat dan karakteristiknya bisa berubah menjadi konflik bersenjata internasional jika adanya pihak-pihak lain yang turut serta mengintervensi konflik tersebut dengan memberikan dukungan baik politik, finansial, pelatihan senjata dan senjata untuk melawan pemerintahan sah.

Penegakan Hukum pada Konflik Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Terdapat beberapa bentuk sanksi yang bisa dikenakan kepada para pihak yang bersengketa dalam konflik internal Suriah, yakni sanksi non militer dan sanksi militer. Dalam konteks hukum internasional, sanksi non militer diatur dalam Pasal 41 Piagam PBB sedangkan sanksi militer diatur dalam Pasal 42 Piagam PBB yang menentukan adanya kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi. Faktanya, justru, organisasi regional, dalam hal ini Uni Eropa yang memberikan sanksi non-militer kepada Suriah yaitu berupa embargo senjata dan embargo penerbangan bagi seluruh maskapai penerbangan di Suriah.

Sanksi lain yang bisa dikenakan kepada Suriah yakni sanksi dikeluarkan dari keanggotaan organisasi internasional sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam konflik internal Suriah. Kenyataannya, negara ini telah dikeluarkan dari keanggotaan Liga Arab pada tanggal 16 November 2011. Suriah juga dapat dikeluarkan dari PBB apabila dipandang tidak melakukan kewajiban berdasarkan Piagam PBB. Adapun mekanisme yang harus dilalui adalah putusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 6 Piagam PBB.

Terkait Digunakannya Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata PBB atau yang lebih dikenal sebagai *The United Nations* (UN) merupakan suatu organisasi internasional yang

terbentuk pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua oleh 51 negara yang berdedikasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan yang bersahabat diantara negara-negara dan mempromosikan perkembangan sosial, standar kehidupan yang lebih baik, serta hak asasi manusia.¹⁹ Hingga saat ini PBB memiliki 193 negara anggota, termasuk di dalamnya Suriah.²⁰

Dalam tugas PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, maka kewenangan lain yang diberikan oleh Piagam PBB kepada Dewan Keamanan PBB ialah bahwa Dewan Keamanan PBB diperbolehkan untuk melancarkan agresi militer dalam rangka menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.²¹

Kewenangan PBB berkaitan dengan digunakannya senjata kimia di dalam konflik bersenjata diberikan oleh CWC. CWC menyatakan bahwa OPCW wajib menjalin kerjasama dengan PBB dalam hal adanya dugaan penggunaan senjata kimia oleh negara bukan anggota OPCW.

Penegakan Hukum pada Konflik Suriah melalui Chemical Weapon Convention (CWC).

Suriah bukan merupakan negara pihak (*state party*) dalam beberapa konvensi internasional. yang yang isinya terkait fakta yang terjadi dalam konflik bersenjata di Suriah. Sehingga, konvensi-konvensi termasuk CWC tersebut menjadi tidak berlaku secara formal dalam konflik bersenjata tersebut. Salah satunya adalah Protokol Tambahan II tahun 1977 sebagai instrumen hukum humaniter yang tidak dapat diberlakukan. Namun demikian, perlindungan hukum humaniter dalam konflik bersenjata non internasional sebagaimana tertuang di dalam Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949 masih dapat diberlakukan mengingat Suriah merupakan negara pihak dalam konvensi tersebut, Selain itu, Statuta Roma 1988 juga tidak berlaku karena Suriah belum meratifikasinya, kendati sudah menandatangani pada tanggal 29 November 2000. Terakhir, penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut ternyata tidak dapat ditegakkan berdasarkan Konvensi Senjata

¹⁹ UN at a Glance, www.un.org/en/aboutun/index.shtml, Diakses pada 13 Juni 2019.

²⁰ Ibid.

²¹ Pasal 42 Piagam PBB.

Kimia (*Chemical Weapon Convention*) karena Suriah belum menjadi negara pihak saat senjata tersebut digunakan. Suriah kemudian meratifikasinya di tahun 2013.²²

Selain itu dalam mencari pelaku penggunaan senjata kimia, OPCW tidak memiliki kewenangan dalam mencari pelaku penggunaan senjata kimia di Suriah, hal ini bertentangan dengan konsep disarmament baru yang seharusnya proses pencarian tersebut harus bersifat inklusif. OPCW seharusnya berperan sebagai pihak yang dominan dalam proses negosiasi untuk melucuti senjata kimia pemerintah Suriah dan juga diberikan kewenangan untuk mencari pelaku pengguna senjata kimia dan tidak hanya memastikan penggunaan senjata kimia sesuai dengan konsep pelucutan (*disarmament*) dengan pendekatan dekonstruksionisme.

OPCW berdasarkan pada pasal-pasal CWC yang digunakannya dalam melaksanakan kewenangannya dimana negara tetap sebagai entitas tertinggi dalam melakukan perlucutan senjata kimia. Seharusnya, sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan pada bab pertama, OPCW harus lebih cepat dalam menanggulangi penggunaan senjata kimia dengan menggunakan pendekatan kontemporer dalam disarmament.

OPCW harus diberikan kewenangan lebih dengan bersifat independen dalam melaksanakan tugas pelucutan senjata kimia terlepas oleh pihak- pihak seperti dewan keamanan PBB. Selain itu, OPCW juga harus terus memperbaharui senyawa kimia apa saja yang dilarang beredar di lingkungan sipil dan memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran senyawa kimia di berbagai belahan dunia khususnya pada wilayah yang sedang mengalami konflik dan mampu menyatakan pihak yang menggunakan senjata kimia secara jelas serta dapat dibuktikan kebenarannya tanpa adanya intervensi kepentingan-kepentingan negara lain.

Penegakan Hukum pada Konflik Suriah melalui Mekanisme Pengadilan

Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court yang untuk selanjutnya disingkat ICC berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara. ICC mengatur kewenangan mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional yang dilakukan secara individu. Kejahatan yang

²² Saga of Chemical Weapons in Syrian Civil War, Journal of Institute for Defence Studies and Analyses, <http://www.idsa.in/cbwmagazine/Saga of chemical weaponsin Syrian Civil War>, Diakses pada 13 Juni 2019.

dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu *the crime of genocide* (pemusnahan etnis/suku bangsa), *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *war crimes* (kejahatan perang), dan *the crime of aggression* (agresi).²³

Tujuan pembentukan ICC adalah menghentikan praktik impunity terhadap pelaku pelanggaran HAM berat yang sering kali dilakukan oleh aktor negara/bangsa. Mereka tidak dapat berlindung dibalik ketentuan nasional karena pelaku pelanggaran HAM berat musuh umat manusia. Masyarakat internasional berkewajiban untuk mengejar menangkap, menahan, mengadili, serta menghukum mereka. Oleh karena itu, ICC memiliki pengaruh sebagai penangkal (*deterrent*) terhadap praktik pelanggaran HAM berat.²⁴

ICC merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB, meskipun dalam kondisi tertentu memiliki hubungan peran.²⁵ Atas dasar inilah pelaku pelanggaran HAM berat dalam konflik Suriah dapat diadili di ICC.

ICC menitikberatkan perannya untuk mengadili individu baik sebagai bagian dari sebuah rezim maupun sebagai bagian dari gerakan pemberontakan, sehingga kegagalan masyarakat internasional untuk mengadili pelaku Pelanggaran HAM berat dan tidak ada lagi pelaku yang tidak dihukum tidak terulang kembali. Akan tetapi dalam kasus ini, Suriah belum meratifikasi Statuta Roma sehingga ini menjadi masalah. Akan tetapi, menurut pasal 13 huruf b Statuta Roma telah diatur bahwa, Dewan Keamanan PBB berdasarkan kewenangannya menurut Bab VII Piagam PBB, berhak untuk menyerahkan kepada Mahkamah melalui Jaksa Penuntut atas kejahatan yang terjadi di wilayah yang belum atau tidak meratifikasi Statuta.²⁶

Pada pasal 13 huruf b ICC merupakan landasan yuridis yang kuat dan legal untuk melegitimasi Dewan Keamanan PBB dalam mengambil kebijakan untuk menyerahkan kasus pelanggaran HAM berat dalam konflik Suriah ke ICC. Adapun landasan yuridis lain adalah bahwa Suriah merupakan Negara Pihak (*State Party*) dari beberapa konvensi HAM

²³International Criminal Court, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauan-politik-dan-hukum/>, Diakses pada 16 Juli 2019.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pasal 2 ICC

²⁶ Pasal 13 huruf b ICC.

internasional berdasarkan asas hukum *Pacta Sun Servanda*. Dengan demikian, maka secara teoritis tidak ada lagi impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Terdapat beberapa bentuk sanksi yang bisa dikenakan kepada para pihak yang bersengketa dalam konflik internal Suriah, yakni sanksi non militer pada Pasal 41 dan sanksi militer pada Pasal 42 Piagam PBB. Perlucutan senjata kimia pemerintah Suriah tidak dilakukan bersamaan dengan perlucutan senjata kimia yang digunakan oleh aktor *non state*. Keterlibatan OPCW sebagai organisasi internasional dalam melucuti senjata kimia oleh terroris IS dan kelompok oposisi yang tidak diakui pemerintah Suriah memiliki keterbatasan dalam beroperasi. Maka dari itu, OPCW sebagai organisasi internasional yang berlandaskan pada CWC dalam perlucutan senjata kimia dunia membutuhkan kewenangan lebih besar dan kelancaran dalam menegakan aturannya.

ICC berperan untuk mengadili individu baik sebagai bagian dari sebuah rezim maupun sebagai bagian dari gerakan pemberontakan, sehingga kegagalan masyarakat internasional untuk mengadili pelaku dalam kasus ini, Suriah belum meratifikasi Statuta Roma sehingga ini menjadi masalah. Berdasarkan pasal 13 huruf b Statuta Roma telah diatur bahwa, Dewan Keamanan PBB berdasarkan kewenangannya menurut Bab VII Piagam PBB, berhak untuk menyerahkan kepada Mahkamah melalui Jaksa Penuntut atas kejahatan yang terjadi di wilayah yang belum atau tidak meratifikasi Statuta. Pada pasal 13 huruf b ICC merupakan landasan yuridis yang kuat dan legal untuk melegitimasi Dewan Keamanan PBB dalam mengambil kebijakan untuk menyerahkan kasus pelanggaran HAM berat dalam konflik Suriah ke ICC.

Saran

Sebaiknya Suriah menjalankan aturan yang sudah ditetapkan berkaitan dengan pemusnahan senjata kimia yang dimilikinya. Jika Suriah gagal melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan padanya, maka Suriah akan dipandang sebagai suatu negara yang tidak memiliki itikad baik untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Disatu sisi OPCW harus diberikan kewenangan lebih independen saat melaksanakan tugas dan wewenang dalam pelucutan senjata kimia tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak lain

yang berkepentingan. Suriah bukan merupakan Negara Pihak dalam ICC maka Dewan Keamanan PBB wajib untuk mengeluarkan satu Resolusi untuk menyerahkan Pengajuan para pelaku kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam konflik Suriah ke ICC oleh Jaksa Penuntut ICC.

Daftar Bacaan

Arlina Permatasari, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, cetakan pertama, International Committee Of The Red Cross, Jakarta, 1999.

Fadillah Agus, Hukum Humaniter Suatu Perspektif, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997.

Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda, ICRC, Jakarta, 2002, h. 108.

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Michael N. Schmitt, The Manual on The Law of Non International Armed Conflict, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Djenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Binatjipta, Bandung, 1968.

Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, ICRC, Geneva, 1992.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya.

<http://www.antaranews.com/berita/396402/bashar-suriah-bukan-perang-saudara-tetapi-diserang-al-qaida>, Diakses pada 5 Juni 2019.

<http://politik.kompasiana.com/2012/07/23/serba-salah-tentang-suriah-480011.html>, Diakses pada 5 Juni 2019.

<http://www.dw.de/as-berikan-bantuan-militer-kepada-pemberontak-suriah/a-16880305>, Diakses pada 5 Mei 2019.

<http://republik-tawon.blogspot.com/2014/10/daftar-kelompok-bersenjata-dalam-perang.html>, Diakses pada 7 Juni 2019.

http://indonesian.ws.irib.ir/international/timur-tengah/item/45250-Saudi_dan_Qatar_,

Diakses pada 10 Juni 2019.

<http://www.dw.de/konferensi-damai-suriah-tanpa-perdamaian/a-17380238>, Diakses pada

10 Juni 2019.

www.un.org/en/aboutun/index.shtml, Diakses pada 13 Juni 2019.

[http://www.idsa.in/cbwmagazine/Saga of chemical weaponsin Syrian Civil War](http://www.idsa.in/cbwmagazine/Saga_of_chemical_weapons_in_Syrian_Civil_War), Diakses pada 13 Juni 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauan-politik-dan-hukum/>,

Diakses pada 16 Juli 2019.